



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
UNIT KERJA : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ERNAWATI A. SESSU
2. Jabatan : KEPALA SUB BIDANG REKAM MEDIK
3. NHK : 648512

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **771.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 12 m2/15 m2 di KAB / KOTA MAMUJU, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 25 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA PALOPO , HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/50 m2 di KAB / KOTA MAMUJU TENGAH, WARISAN Rp. 55.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA MAMUJU, HASIL SENDIRI Rp. 66.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA MAMUJU, WARISAN Rp. 65.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 16 m2/16 m2 di KAB / KOTA MAMUJU, WARISAN Rp. 80.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **666.880.000**

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOBIL, TOYOTA HILUX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. MOTOR, HONDA TRAIL Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000



4. MOTOR, HONDA TRAIL Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
5. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 29.880.000
6. MOBIL, TOYOTA RUSH GR SPORTY Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000
7. MOBIL, WULING CONVERO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	96.150.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	7.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	8.500.000
Sub Total	Rp.	1.549.530.000

III. HUTANG Rp. 17.637.480

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.531.892.520

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.